KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

			=				
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 1 7 3 9			н.4 Х	H.4 X Final	
		H.2 X Pembetulan Ke-	H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			Tidak Final	
A IDENTITAC DENERIMA DENCLIACII ANI VANC DIDOTONO							
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
A.1 NPWP : 1 5 2 4 9 6 6 7 7 2 2 0 0 0							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : CITRALIA JANUARTY							
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
5	21-402-01	7.855.000	7.855.000	0	5	392.750	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota							
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 04822/LS-TJ/RSJD.AHM/2022							
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 1 1 dd 0 5 mm 2 0 2 2 yyyy							
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.							
Nomor: Tanggal dd mm yyyy							
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK							
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0 0 C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR							
C.4 Tanggal :		1 1 dd 0 5 mm	2 0 2 2 yyyy	ا للللا			
C.5 Nama Penan	: ndatangan :	RIANDY	2 0 2 2 3				
tandatangani secara elektronik.							
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan.							

3MP7OZ5J